

**BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI DAN REPRESENTASINYA  
DALAM KOMIK *HOMUNCULUS* JILID 1  
KARYA HIDEO YAMAMOTO (2021)**

**Miranti Artarina**

Prodi Bahasa Jepang, Universitas Nasional PASIM  
[miranti.artarina18@gmail.com](mailto:miranti.artarina18@gmail.com)

**Abstract**

*Burakumin (部落民) or Buraku people, is a designation or label given by the Japanese government during the Edo period. In modern times, discrimination against a social class that is considered 'lowly' can be found among the Japanese homeless. This study describes the forms of discrimination in Japan during the Edo Era and the Modern Era, and how these forms of discrimination are represented in the Homunculus comic Volume 1 by Hideo Yamamoto (2021). The research method used is the historical method and the cultural studies approach. The result of the study shows that discrimination in the Edo Era was carried out by separating the places of residence of those with 'lower' occupations. A form of discrimination in the modern era is found in the actions of the Japanese Government which tried to expel and hide the homeless from public places during the 2020 Olympics to get a 'clean' image of Japan. The form of discrimination represented in the Homunculus comics volume 1 by Hideo Yamamoto (2021) can be seen in the treatment of the main character, Susumu Nakoshi, who discriminated against homeless people living in Shinjuku Park, Japan.*

**Keywords:** *Buraku people, discrimination, homunculus, homeless, pariah*

**Abstrak**

*Burakumin (部落民) atau masyarakat Buraku adalah kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi pada zaman Edo. Pada zaman modern, diskriminasi dapat ditemukan pada kaum tunawisma Jepang. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk diskriminasi di Jepang pada Zaman Edo dan Zaman Modern, serta bagaimana bentuk diskriminasi tersebut direpresentasi dalam komik *Homunculus* jilid 1 karya Hideo Yamamoto (2021) jilid 1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dan pendekatan kajian budaya. Hasil penelitian menunjukkan bentuk diskriminasi pada zaman Edo dilakukan dengan memisahkan lokasi tempat tinggal mereka yang berprofesi 'rendah'. Bentuk diskriminasi pada zaman modern ditemukan pada tindakan Pemerintah Jepang yang berusaha mengusir dan menyembunyikan kaum tunawisma dari tempat-tempat umum selama Olimpiade 2020 untuk mendapatkan citra Jepang yang 'bersih'. Bentuk diskriminasi yang direpresentasikan pada komik *Homunculus* jilid 1 karya Hideo Yamamoto (2021) dapat dilihat dari perlakuan karakter utama, Susumu Nakoshi, yang mendiskriminasi para tunawisma yang tinggal di taman Shinjuku, Jepang.*

**Kata kunci:** *kaum Buraku, diskriminasi, Homunculus, tunawisma.*

## 1. Pendahuluan

Jepang tidak memiliki hukum yang mengatur diskriminasi terhadap ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan gender. Berdasarkan laporan Human Right Watch (2020) disebutkan “Japan has no law prohibiting racial, ethnic, or religious discrimination, or discrimination based on sexual orientation or gender identity. It accepts an extremely small number of refugees each year, mostly from Asia. Japan has no national human rights institutions.” (Human Rights Watch, 15 Januari 2020). Dengan kata lain, perlakuan diskriminasi di Jepang dianggap sebagai hal yang tidak melanggar hukum karena tidak adanya konstitusi yang melarangnya.

Pada musim panas 2020, sebuah diskusi tentang gerakan Black Lives Matter di media sosial Twitter menyatakan bahwa “diskriminasi di Jepang tidak seburuk di Amerika Serikat” (Mainichi Japan, 2021). Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada bulan Februari 2009 oleh Yayasan Beasiswa Korea pada 1030 responden apakah mereka pernah mengalami diskriminasi, ternyata hasilnya 30.9% responden mengaku mereka pernah ‘dilecehkan secara verbal’ seperti dianggap sebagai ‘mata-mata Korea Utara’ atau diteriaki ‘pulang saja ke negara asalmu’ di tempat umum (Mainichi Japan, 2021). Ujaran kebencian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang tidak menginginkan keberadaan kaum minoritas yang dianggap ‘berbeda’ atau bukan bagian dari mereka.

Dalam sejarah, Jepang pernah menerapkan politik isolasi (sakoku) untuk menutup diri dari pengaruh bangsa asing dari segala bidang sejak tahun 1633 sampai tahun 1854 pada masa pemerintahan klan Tokugawa di Zaman Edo. Politik sakoku ini tidak hanya mengakibatkan Jepang tidak bisa berdagang dengan bangsa asing, masyarakat Jepang pun tumbuh menjadi masyarakat yang tertutup dan terisolasi dari keberagaman budaya.

Selain politik sakoku, homogenitas masyarakat Jepang juga dapat dilihat dari peribahasanya “出る杭は打たれる” deru kui ga utareru, atau “paku yang mencuat akan dipukul”. Peribahasa ini menjelaskan mentalitas masyarakat Jepang yang tidak menyukai perbedaan dan keberagaman serta menginginkan agar setiap orang mengikuti standar sosial

yang sudah ditetapkan demi terciptanya hubungan harmonis dalam bermasyarakat. Homogenitas ini selanjutnya menjadi akar permasalahan diskriminasi yang terjadi di Jepang sejak zaman Edo.

Salah satu karya sastra yang menunjukkan adanya diskriminasi tersebut adalah komik *Homunculus* jilid 1 karya Hideo Yamamoto (2001). Komik tersebut dipilih karena adegan-adegan serta dialog yang terdapat di dalamnya sangat jelas menunjukkan perlakuan diskriminasi terhadap kaum tunawisma di Jepang pada era modern. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) bentuk diskriminasi di Jepang pada zaman Edo; (2) bentuk diskriminasi di Jepang pada zaman modern; dan (3) bentuk diskriminasi di Jepang era modern yang direpresentasikan dalam komik *Homunculus* jilid 1 karya Hideo Yamamoto (2001).

## **2. Metodologi**

Sebagai ilmu, sejarah memerlukan metode dan metodologi (Wasino & Hartatik, 2018: 11). Menurut Garraghan yang dikutip oleh Wasino & Hartatik (2018: 11), metode sejarah dapat didefinisikan sebagai “suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah”. Dari pengertian tersebut, terdapat tiga langkah di dalam metode sejarah, yaitu: 1) tahap heuristik, yaitu pencarian sumber-sumber keterangan atau pencarian bukti-bukti sejarah; 2) tahap kritisisme, yaitu penilaian atau pengujian bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandang yang bermuatan fakta; dan 3) tahap penyajian, yaitu penceritaan atau penyajian yang bersifat formal (resmi) dari temuan hasil sejarah (Wasino & Hartatik, 2018: 11–12).

Pada penelitian ini, tahap heuristik dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber sejarah mengenai diskriminasi terhadap kaum *buraku* di zaman feodal Edo (1603-1867) dan pada zaman modern (1922-2002). Tahap kritisisme dilakukan dengan cara mengujikan sumber sejarah dengan fakta dan realita yang terjadi. Selanjutnya, tahap penyajian dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan secara formal.

Kajian budaya adalah sebuah pendekatan lintas-disiplin ilmu yang secara luas bisa diterapkan pada budaya tradisional maupun populer. Kajian budaya meneliti atau mengkaji

berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan). Kajian budaya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang di dalamnya masalah kebudayaan itu tumbuh dan berkembang (Lubis, 2004: 108).

Kaum *buraku* sebagai sebuah kelas yang tidak diakui dalam pembagian kasta zaman Edo, dan kaum tunawisma yang mendapat perlakuan diskriminatif pada zaman modern adalah sebuah objek politik kebudayaan. Pada tulisan ini, representasi kaum *buraku* pada komik *Homunculus* jilid 1 karya Hideo Yamamoto akan disajikan secara visual beserta deskripsi, lalu diinterpretasikan menggunakan teori hegemoni Gramsci untuk melihat diskriminasi terhadap kaum *buraku* dan tunawisma oleh Pemerintah Jepang.

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni, konsensus di sini berarti spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan lainnya. Konsensus bisa terjadi; 1) karena rasa takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri, 2) karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu, dan 3) karena kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu (Siswati, 2018: 21).

Pada tulisan ini, diskriminasi yang terjadi pada kaum *buraku* dan tunawisma disajikan dengan cara mengidentifikasi hegemoni yang dilakukan oleh kelas penguasa yaitu Pemerintah Jepang serta bentuk konsensus yang dijalankan oleh kaum *buraku* dan tunawisma sebagai kelas yang termarginalkan yang terkena kebijakan segregasi atau pemisahan oleh Pemerintah Jepang dan menerima perlakuan diskriminasi oleh masyarakat sekitar.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Berikut ini adalah deskripsi bentuk diskriminasi kaum *buraku* di Jepang pada zaman Edo, bentuk diskriminasi kaum tunawisma di Jepang pada zaman modern, dan representasi diskriminasi terhadap kaum tunawisma di Jepang pada zaman modern dalam komik *Homunculus* jilid 1 karya Hideo Yamamoto.

### a. Bentuk Diskriminasi di Jepang pada Zaman Edo

Perlakuan diskriminatif terhadap kaum marjinal sebetulnya bukan hal baru, seorang sosiolog Jepang bernama Yamamoto menjelaskan bahwa sejak Zaman Edo (tahun 1603-1867) telah terjadi diskriminasi terhadap kaum *Buraku* atau ‘*Burakumin*’ yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya. *Burakumin* (部落民) adalah sebutan untuk komunitas sosial buangan di Jepang. Secara historis, istilah ‘*burakumin*’ atau kaum *buraku* muncul pada zaman Edo atau zaman Tokugawa (1603-1867), bagi orang-orang yang memiliki profesi yang dianggap ‘kotor’ atau ‘tercemar’ (*kegare*, 汚れ) oleh masyarakat, seperti algojo, pengurus makam, pekerja rumah jagal, tukang daging, atau penyamak kulit (Roth, 2007). Konsep ‘*kegare*’ berhubungan dengan ajaran agama Shinto, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, darah, ataupun ekskresi makhluk hidup adalah ‘kotor’ dan harus disucikan (Roth, 2007).

*Buraku* 部落 sendiri berarti dusun kecil, dan pemerintah administratif pada Zaman Edo membuatkan wilayah tempat tinggal yang disebut *buraku* khusus bagi masyarakat dengan profesi ‘*kegare*’ tersebut. Diskriminasi terhadap kaum *Buraku* awalnya terlihat dari perbedaan wilayah tempat tinggal, kaum *Buraku* yang ‘kotor’ tidak diperbolehkan bercampur dengan masyarakat lainnya. Pemisahan wilayah tempat tinggal ini pun selanjutnya berkembang menjadi diskriminasi sosial, terbukti dengan sebutan-sebutan buruk untuk profesi kaum *buraku* seperti *eta* 穢多 yang berarti ‘orang buangan’ bagi tukang jagal, algojo, tukang samak, dan pengurus makam; serta *hinin* 貧人 dan ‘非人’ yang berarti orang miskin dan ‘bukan manusia’ untuk mereka yang berprofesi sebagai pengemis dan penghibur jalanan (Miura, 2019: 28; Visočnik, 2014: 131).

Perlakuan diskriminatif terhadap kaum *buraku* pada zaman Edo terus berlanjut sampai ke keturunannya, karena semua nama anggota keluarga kaum *buraku* tidak dimasukkan ke dalam sistem registrasi kependudukan *Koseki* (seperti kartu keluarga di Indonesia). Boyle menjelaskan bahwa kaum *buraku* hanya boleh menikah dengan sesama mereka, dan jika ada yang ingin menikahi seseorang dari keluarga *non-buraku*, biasanya keluarga *non-buraku* akan

memeriksa asal-usul keturunan melalui *koseki* dan akhirnya menentang pernikahan tersebut (Visočnik, 2014: 131). Selanjutnya Mist yang dikutip oleh Visočnik (2014: 131) menjelaskan bahwa konstruksi sosial yang ditetapkan oleh ke-*shogun*-an Tokugawa di Zaman Edo dijelaskan sebagai berikut: 士-農-工-商-穢多-貧人 *shi-no-ko-sho-eta-hinin*, atau samurai – pengrajin – pedagang – petani – *eta* – *hinin*. Samurai adalah kelompok kasta paling atas, selanjutnya pengrajin atau ahli pembuat kerajinan tangan dan pedagang tidak superior satu sama lain, mereka dikelompokkan sebagai ‘masyarakat kota’, petani ditempatkan di kasta terbawah, sedangkan *eta* dan *hinin* dikelompokkan sebagai kaum *buraku* dan dianggap berada di luar sistem kasta (Visočnik, 2014: 131).

Dalam perkembangannya, sistem kasta dihapus oleh pemerintahan Meiji pada tahun 1872 (Chapman, 2011: 6). Kasta samurai dihapus dan dileburkan bersama pengrajin, pedagang, dan petani sebagai 平民 *heimin* atau warga, dan kelompok *eta* dan *hinin* didaftarkan ke sistem *koseki* sebagai 新平民 *shinheimin* atau warga baru (Chapman, 2011: 6). Pemberian label *shinheimin* di dalam *koseki* ini akhirnya menimbulkan masalah diskriminasi baru, karena label *shinheimin* bagi para *buraku* tersebut menjadi stigma yang melekat dan ‘legal’ (Miura, 2019: 30). Kaum *buraku* tidak bisa bersekolah tinggi, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan berdampak pada tingkat kemiskinan yang sangat tinggi sehingga mereka akan melakukan perbuatan apapun demi bertahan hidup (Miura, 2019: 30). Akibatnya banyak tindak kriminal yang dilakukan oleh kaum *buraku*. Pada tahun 1880, Kementerian Kehakiman Jepang membuat pernyataan “*Eta* dan *Hinin* yaitu golongan manusia terendah, hampir setara dengan binatang” (Miura, 2019: 30). Pada tahun 1906, Gubernur Prefektur Mie, Arimatsu Hideyoshi membuat pernyataan bahwa beliau sangat menyayangkan perilaku diskriminatif terhadap kaum *buraku*, tetapi secara statistik memang kaum *buraku* melakukan aksi kriminal terbanyak (Miura, 2019: 30).

Demonstrasi untuk membela hak serta menentang diskriminasi terhadap kaum *Buraku* mulai marak terlihat pada tahun 1920-an (Miura, 2019: 30). Sekarang di zaman modern, masyarakat Jepang pada umumnya tidak terlalu menaruh fokus tentang stigma terhadap kaum

*Buraku* dan menganggapnya sebagai bagian dari sejarah (Miura, 2019: 30). Namun, diskriminasi tersebut tetap ada, seperti pada tahun 2001, Taro Aso yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang tahun 2008-2009 mengomentari kebijakan tentang diperbolehkannya kaum *Buraku* untuk menjabat sebagai perdana menteri, dengan pernyataan, “Apa benar kita akan membiarkan *mereka* (kaum *Buraku*) memimpin Jepang?” (Miura, 2019: 31). Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Jepang masih menerapkan segregasi atau pemisahan untuk menjauhkan kaum *Buraku* dari dunia politik.

Berbeda dengan hegemoni Pemerintah Jepang terhadap kaum tunawisma yang berbentuk konsensus, maka di zaman modern hegemoni terhadap kaum *buraku* berbentuk penindasan. Kaum *buraku* pada zaman Edo dipaksa untuk tinggal di lokasi yang berbeda dan tidak mendapatkan hak untuk didaftarkan dalam sistem registrasi kependudukan. Bahkan, keturunan kaum *Buraku* sampai tahun 2000-an masih tidak diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam politik di pemerintahan Jepang.

#### **b. Bentuk Diskriminasi di Jepang pada Zaman Modern**

Pada zaman modern, diskriminasi di Jepang masih ada. Diskriminasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Jepang terhadap kaum tunawisma selama Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung. Pada liputan yang dilakukan oleh BBC, selama Olimpiade Tokyo 2020 para tunawisma ‘ditertibkan’, yaitu dengan cara mengusir mereka dari tempat-tempat publik seperti stasiun dan taman kota. “Pemerintah ingin kami pergi agar kami tidak terlihat”, kata gelandangan Tetsuo Ogawa (Sicca, 2021).

Bukan hanya pemerintah, perlakuan diskriminatif juga dilakukan oleh seorang YouTuber terkenal asal Jepang, Daigo Matsumura, yang mengajak masyarakat untuk memilih menyelamatkan kucing daripada memberikan bantuan kepada tunawisma karena dianggap ‘menyia-nyiakan uang’. Dalam video yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 7 Agustus 2021, DaiGo mengatakan "Jika ada uang untuk memberi makan orang-orang yang sejahtera, saya ingin Anda menyelamatkan kucing itu. Mudah, jadi saya tidak peduli dengan kehidupan tunawisma. Sejujurnya, itu menjengkelkan dan tidak membantu." (Dewi, 2021).

Perlakuan diskriminasi terhadap kaum tunawisma di Jepang terjadi sejak tahun 1900-an, semenjak pecahnya gelembung ekonomi di Jepang, yang mengakibatkan naiknya angka pengangguran sehingga berpengaruh pada penambahan jumlah tunawisma di Jepang (Elvrum & Wong, 2012: 19). Kaum tunawisma ini biasanya berasal dari para buruh harian lepas yang gagal mendapatkan pekerjaan dari 寄場 *Yoseba* atau Kantor Penempatan Tenaga Kerja Umum di Jepang (Kimura, 2010: 1). *Yoseba* berfungsi sebagai pusat layanan yang menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Setiap pagi biasanya buruh harian lepas berkumpul di *Yoseba* untuk mencari lowongan pekerjaan, dan jika mereka gagal mendapatkannya, para buruh ini kembali ke tempat penginapan murah yang disebut ドヤ *Doya* (Kimura, 2010: 1). *Doya* sendiri sebenarnya adalah sebuah istilah slang kebalikan dari kata 宿 *Yado* yang artinya penginapan, namun istilah *Doya* dipakai untuk menyebut penginapan murah yang terletak di daerah kumuh (Budianto, 2019). Selanjutnya, para buruh harian yang telah kehabisan uang untuk membayar penginapan akhirnya terpaksa tidur di pinggir jalan, di taman-taman, serta di pinggiran stasiun dan akhirnya menjadi kaum tunawisma (Budianto, 2019).

Para tunawisma ini menerima perlakuan diskriminatif karena adanya stigma yang menganggap mereka sebagai ‘gelandangan’ atau ‘orang buangan’ (Kambayashi, 2004). Mereka awalnya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena kalah bersaing dengan pekerja muda, tetapi dalam perkembangannya kaum tunawisma ini merasa teralienasi karena adanya pandangan negatif terhadap usia mereka (Kambayashi, 2004). Kaum tunawisma ini dianggap sebagai golongan masyarakat yang tidak berguna, karena secara usia mereka sudah tidak lagi produktif bekerja, selain itu mereka juga tidak mempunyai kegiatan apapun selain tiduran dan berkumpul di tempat-tempat umum sehingga terkesan membuat kumuh pemandangan.

Kaum tunawisma di Jepang umumnya tinggal di perkampungan terkumuh yang terletak di Kamagasaki atau yang sekarang disebut sebagai distrik Airin, di wilayah Nishinari, Osaka. Sen Arimura, menjelaskan sejarah terbentuknya kawasan kumuh Kamagasaki dalam *The Comic Book Diary of Kamayan: The Life of a Day-Laborer in Kamagasaki* sebagai berikut.

Kamagasaki adalah wilayah kawasan kumuh, tempat tinggal para korban Perang Dunia II. Di sepanjang jalan, terdapat banyak doya atau penginapan murah. Di belakangnya terdapat pemukiman warga berupa gubuk-gubuk kayu. Jalannya sempit seperti labirin. Deretan gubuk yang berlokasi di bawah jalan layang jalur kereta Nankai dijuluki "Nankai Hotel." Orang-orang bekerja serabutan, rata-rata pekerja harian, ada pemulung, tukang semir sepatu, tukang rokok, dan lain-lain (Arimura, 1991).

Setelah Perang Dunia II, pemerintah pusat memerintahkan jalan-jalan diperlebar dan banyak membangun penginapan standar di Kamagasaki. Pada tahun 1961, ada 175 penginapan dengan kapasitas 15.000 tamu. Tempat perekrutan pekerja harian berada di sisi selatan jalur kereta api Nankai. Masa-masa ini adalah periode pertumbuhan ekonomi yang cepat bagi Jepang, dan banyak pekerja pertanian dan pekerja dari tambang yang ditutup berbondong-bondong ke Kamagasaki. Populasi pekerja harian pria lajang tiba-tiba membengkak melewati 10.000, banyak dari mereka berusia 20-an dan 30-an. Selain pekerjaan konstruksi, ada juga banyak pekerjaan di bidang perkapalan dan manufaktur (Arimura, 1991).

Pada tahun 1970-an, terjadi ledakan di bidang konstruksi yang menarik pekerja harian dari seluruh Jepang untuk mencari pekerjaan di Kamagasaki. Kantor Ketenagakerjaan Airin bekerja sangat sibuk. Perekonomian maju pesat, tetapi di sisi lain Jepang terkena dampak krisis minyak dunia untuk pertama kalinya (tahun 1973), sehingga sebagian masyarakat mulai menjadi pengangguran (Arimura, 1991).

Pada akhir tahun 1980-an hingga 1990-an, terjadi masa kejayaan ekonomi. Pembangunan di wilayah Kamagasaki semakin pesat, tapi di sisi yang sama terjadi kesenjangan sosial antara rakyat jelata dan masyarakat menengah ke atas yang diuntungkan dengan adanya gelembung ekonomi. Pada tanggal 2-7 Oktober 1990, terjadi huru-hara besar sebagai bentuk protes rakyat jelata terhadap polisi yang bekerja sama dengan yakuza di wilayah setempat (Arimura, 1991).

Tahun 1991 adalah awal meletusnya gelembung ekonomi dan Kamagasaki mengalami resesi yang hebat. Pekerja harian lepas berkumpul di depan Pusat Ketenagakerjaan Airin, berharap mendapatkan pekerjaan, tetapi lowongan pekerjaan sangat sedikit. Terdapat penuaan populasi secara bertahap di Kamagasaki, dengan usia rata-rata 52 tahun. Rakyat tidak banyak

mendapatkan bantuan dari pemerintah, terkadang mereka mendapatkan makanan gratis dari komunitas Kristen setempat. Para pekerja harian ini akhirnya terpaksa keluar dari penginapan karena tidak bisa membayar sewa dan akhirnya menjadi tunawisma (Arimura, 1991).

Dari penjelasan Sen Arimura tersebut, tergambar jelas perubahan kawasan pemukiman Kamagasaki, yang di awal 1950-an adalah lokasi kumuh tempat tinggal korban Perang Dunia II di Osaka; kemudian terjadi ledakan konstruksi besar-besaran sehingga populasi tenaga kerja harian meningkat dari tahun 1960-1990, tetapi di sisi lain muncul kesenjangan sosial antara rakyat jelata dan mereka yang diuntungkan oleh gelembung ekonomi; dan pada tahun 1991 akibat meletusnya gelembung ekonomi, terjadi resesi ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan bertambahnya jumlah tunawisma di Kamagasaki.

Pemerintah Jepang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan dianggap sebagai negara yang sukses mengurangi tingkat kemiskinannya sampai di bawah 0%, yaitu sebanyak 3.992 jiwa dari populasi 125 juta penduduk pada tahun 2020 (Bravo, 2021). Sayangnya, rendahnya angka kemiskinan ini tidak menjamin bahwa permasalahan kaum tunawisma di Jepang menjadi tertangani. Jepang mengeluarkan peraturan yang melarang untuk mengemis, sehingga pengemis dianggap sebagai sebuah pelanggaran kriminal (Bravo, 2021).

Selanjutnya, Jepang juga dikritik karena tidak menyediakan cukup tempat yang bisa menampung kaum tunawisma, terbukti dengan pengusiran para tunawisma dari tempat-tempat umum terutama saat berlangsungnya Olimpiade Tokyo 2020 (Bravo, 2021). Stigma yang melekat pada kaum tunawisma sebagai 'orang buangan' menyebabkan mereka menerima sedikit sekali bantuan dari masyarakat sekitar, bahkan mengakibatkan kaum tunawisma Jepang menerima diskriminasi seperti ujaran kebencian yang diucapkan oleh tokoh masyarakat seperti Matsumura Daigo yang disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hegemoni yang dilakukan Pemerintah Jepang sebagai penguasa tidak dilakukan dengan penindasan melalui dengan menggunakan mekanisme konsensus. Pemerintah Jepang tidak menganggap tunawisma sebagai kriminal yang harus ditangkap, tetapi mereka dilarang untuk mengemis. Selanjutnya,

Pemerintah Jepang tidak melarang para tunawisma untuk berdiam di tempat umum, namun sewaktu-waktu para tunawisma dilarang ‘muncul’ atau berkerumun di tempat publik selama ada perhelatan besar, seperti Olimpiade Tokyo 2020. Kemudian, Pemerintah Jepang tidak membuat peraturan khusus yang melarang diskriminasi, sehingga masyarakat bebas untuk mengeluarkan ujaran kebencian kepada kaum tunawisma seperti yang dilakukan oleh Matsumura Daigo. Dalam hal ini, kaum tunawisma tidak memiliki kuasa untuk membela diri ataupun melindungi diri dari perlakuan diskriminasi karena: 1) adanya rasa takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri; 2) terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu; dan 3) kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu.

### c. Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Tunawisma Di Jepang Era Modern Yang Terepresentasi Pada Komik *Homunculus* Jilid 1 Karya Hideo Yamamoto

Pada komik *Homunculus*, jilid 1, bab 1, Yamamoto memperkenalkan tokoh utamanya yang bernama Susumu Nakoshi, laki-laki, 34 tahun, seorang tunawisma yang tinggal di dalam mobil pribadinya di seberang hotel mewah di kawasan barat Shinjuku. Mobil Susumu diparkir di depan hotel mewah di Shinjuku



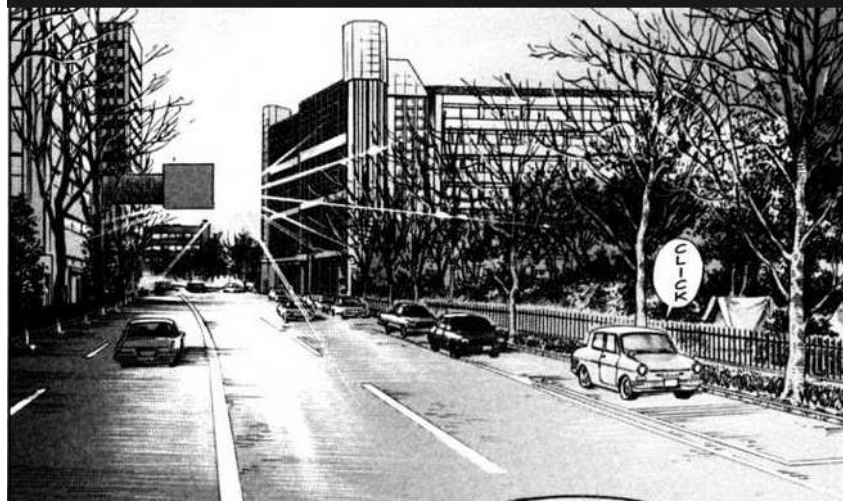
**Gambar 1. Susumu tidur di dalam mobil**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 2)



**Gambar 2. Lokasi Parkir Mobil Susumu di Depan Hotel Mewah**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 4-5)

Jika dilihat dari desain karakter, Susumu digambarkan mengenakan setelan jas dan sepatu berbahan bagus, memiliki mobil pribadi, dan gaya rambut klimis. Hal ini menunjukkan status sosial Susumu yang berlatar belakang karyawan kantor atau *sarariman* dalam bahasa Jepang. Penempatan mobil Susumu yang diparkir di depan hotel mewah juga menunjukkan adanya hubungan antara kelas sosial/latar belakang Susumu dan gaya hidup kelas menengah.

Yang menarik, ternyata di seberang hotel di sebelah tempat parkir mobil Susumu, terdapat taman umum yang didiami oleh banyak tunawisma yang rata-rata sudah lanjut usia, dan mereka tinggal di dalam tenda-tenda (Yamamoto, 2001, p. 9). Di sini Yamamoto menggambarkan Susumu sebagai orang yang tinggal di antara dua dunia, yaitu antara kelas sosial menengah ke atas (direpresentasikan oleh hotel mewah) dan kaum marginal (direpresentasikan oleh tenda-tenda kaum tunawisma). Namun Susumu terlihat masih belum bisa meninggalkan gaya hidupnya yang lama dan masuk ke kaum tunawisma secara permanen, itulah mengapa Susumu digambarkan selalu tidur di dalam mobil yang menyimbolkan gaya hidup pengembara/berpindah-pindah (nomaden).



**Gambar 3. Lokasi Parkir Mobil Susumu di Sebelah Taman Tempat Tinggal Tunawisma**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 9)



**Gambar 4. Tunawisma Mendirikan Tenda sebagai Tempat Tinggal**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 9)

Para tunawisma di taman Shinjuku barat tersebut menjalankan aktivitas sehari-hari dengan membersihkan diri atau pakaian mereka menggunakan fasilitas keran air publik di taman. Ada yang berusaha bertahan hidup dengan cara mengais dan memulung sampah dari tempat sampah di taman.



**Gambar 5. Tunawisma Memanfaatkan Fasilitas Air di Taman**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 9)



**Gambar 6. Tunawisma Mengais Sampah**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 12)

Dalam komik *Homunculus* ini, para tunawisma juga digambarkan menghabiskan hari dengan tidur di bangku-bangku taman. Mereka melakukan itu karena tidak punya pekerjaan atau aktivitas yang berarti. Sebaliknya, Susumu digambarkan aktif membaca buku di taman

saat waktu luang. Hal ini menunjukkan adanya kontras antara kegiatan yang biasa dilakukan oleh kelas atas dan kelas bawah, dan ini direpresentasikan dengan gambar bangunan tinggi yang berdiri di depan taman tempat tinggal para tunawisma yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran.



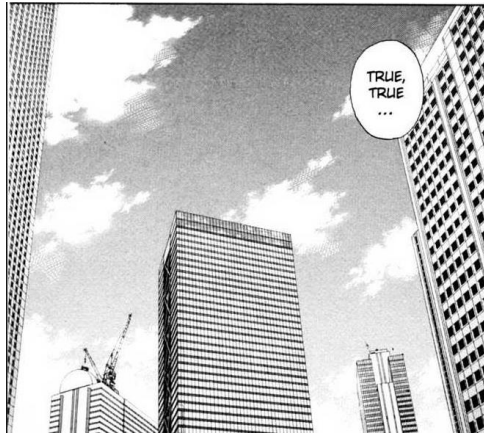
**Gambar 7. Susumu yang Membaca Buku pada Saat Tunawisma Lainnya Tidak Memiliki Aktivitas Berarti**

Sumber: (Yamamoto, 2001: 13)



**Gambar 8. Dialog antara Susumu dan Seorang Tunawisma**

Sumber: (Yamamoto, 2001: 14)



**Gambar 9. Bangunan Perkantoran di Depan Taman Tempat Tinggal Tunawisma**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 15)

Pada malam hari, para tunawisma di taman berkumpul untuk makan malam. (Homunculus, 2003: jilid 1, bab 1, hal. 25). Para tunawisma itu kemudian berbincang-bincang mengeluhkan tentang pemerintahan yang korup, tentang politisi yang berpura-pura tidak tahu apa-apa saat terlibat sebuah kasus, dan tentang kekecewaan terhadap pemerintah yang telah ‘membuang’ mereka (Homunculus, 2003: jilid 1, bab 1, hal. 26). Dialog yang diucapkan oleh seorang tunawisma adalah “Kita telah bertaruh nyawa untuk membangun gedung-gedung itu, dan ketika pembangunannya sudah selesai mereka membuang kita. Mau jadi apa negara ini?”. Kembali, Hideo Yamamoto menghadirkan ilustrasi gedung tinggi dengan lampu yang gemerlap di malam hari, untuk memperkuat kesan ironi atas pernyataan tunawisma tersebut.



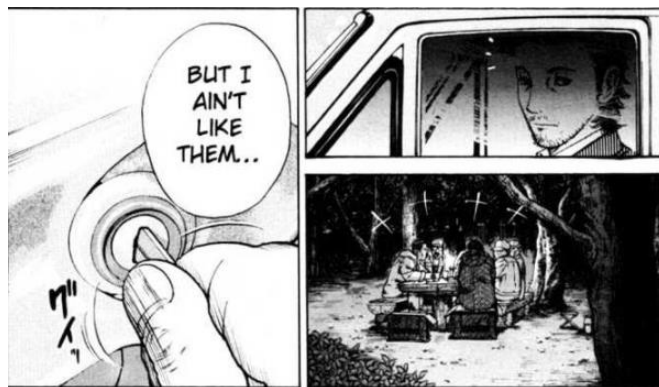
**Gambar 10. Para Tunawisma Berkumpul untuk Makan Malam**  
Sumber: (Yamamoto, 2001: 25)



**Gambar 11. Gedung Perkantoran yang Tetap Aktif di Malam Hari**

Sumber: (Yamamoto, 2001: 26)

Selesai makan malam, Susumu memuntahkan makanan yang telah ia makan bersama tunawisma di toilet umum. Ia lalu kembali ke mobilnya. Sambil memandang kaum tunawisma dari balik jendela mobilnya, Susumu mengatakan “aku tidak sama seperti mereka”. Hal ini seolah menunjukkan Susumu yang tidak mau dikategorisasikan sebagai bagian dari kaum tunawisma, dan merendahkan mereka.



**Gambar 12. Susumu Pergi Meninggalkan Kaum Tunawisma dengan Mobilnya**

Sumber: (Yamamoto, 2001: 25)

Dari penggambaran serta dialog-dialog yang diucapkan oleh Susumu dan para tunawisma di atas, dapat disimpulkan berikut ini.

(1) Walaupun juga merupakan seorang tunawisma, Susumu Nakoshi menganggap rendah tunawisma yang lain, dan menolak mengidentifikasi diri sebagai bagian dari mereka. Hal ini menunjukkan adanya stigma ‘rendahan’ yang menempel pada kaum tunawisma Jepang sehingga mereka didiskriminasi oleh masyarakat kalangan ‘atas’.

(2) Penggambaran para tunawisma sebagai laki-laki paruh baya yang dulunya merupakan buruh atau pekerja yang membantu pembangunan gedung-gedung bertingkat di sekitar Jepang sesuai dengan sejarah lahirnya tunawisma dari distrik Kamagasaki saat terjadi ledakan gelembung ekonomi seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

(3) Walaupun terlihat mengeluh dan menyesalkan perlakuan Pemerintah Jepang yang seolah ‘membuang’ atau ‘tidak mempedulikan’ nasib para tunawisma, mereka tidak melakukan tindakan lebih lanjut seperti protes ke jalan, seolah mereka pasrah menerima nasib. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktek hegemoni yang dilakukan Pemerintah Jepang kepada tunawisma yang berbentuk konsensus, terjadi penerimaan dan kepatuhan kaum tunawisma kepada hasil konsensus baik disebabkan oleh munculnya rasa takut jika tidak menerima hasil konsensus atau sudah menerima diri mereka sebagai bagian dari ‘orang buangan’.

#### **4. Simpulan**

Terdapat perbedaan bentuk hegemoni yang dilakukan Pemerintah Jepang kepada *Buraku* dan kaum tunawisma. Pada Zaman Edo, pemerintah Jepang menerapkan hegemoni dalam bentuk penindasan dengan cara memisahkan lokasi tempat tinggal kaum *Buraku* berdasarkan jenis profesi yang dianggap ‘rendahan’, tidak mendaftarkan mereka ke dalam sistem registrasi kependudukan, bahkan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk masuk ke dunia pemerintahan. Pada zaman modern, praktek hegemoni berbentuk konsensus bukan penindasan, dibuktikan dengan tidak adanya undang-undang yang melarang keberadaan tunawisma, tetapi mereka dilarang mengemis, dan tidak diharapkan berada di tempat-tempat umum.

Selanjutnya, bentuk diskriminasi kepada kaum tunawisma yang terdapat dalam komik *Homunculus* jilid 1 karya Hideo Yamamoto (2001) adalah berupa penolakan tokoh utama Susumu Nakoshi kepada kaum tunawisma dengan menganggap rendah mereka, walaupun ia

pun termasuk golongan tunawisma. Dalam komik ini juga tergambar kekecewaan kaum tunawisma kepada Pemerintah Jepang yang seolah “membuang” mereka setelah selesainya era pembangunan besar-besaran di tahun 1990-an.

Tulisan ini jauh dari sempurna, masih terdapat celah-celah seperti perlunya kajian lebih mendalam terhadap pembagian strata sosial zaman Edo *shi-no-ko-sho-eta-hinin*, atau perlakuan diskriminatif yang dialami oleh masyarakat ‘kegare’ Jepang lainnya seperti yakuza, prostitusi, dan lain-lain. Semoga tulisan ini bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit mengenai bentuk diskriminasi yang dialami masyarakat Jepang pada era modern.

## Daftar Pustaka

- Arimura, S. (1991). The Comic Book Diary of Kamayan: The Life of a Day-Laborer in Kamagasaki. *Environment and Planning D: Society and Space*, 9(2), 135–149.  
Diakses dari: <https://doi.org/10.1068/d090135>
- Bravo, E. (2021). *Homelessness in japan: the country with the smallest percentage of homeless people*. Tomorrow.City.  
Diakses dari <https://tomorrow.city/a/homelessness-in-japan>
- Budianto, F. (2019). *Mengenal Kamagasaki, Kawasan Kumuh Saksi Pertumbuhan Ekonomi Jepang Tahun 1960 s.d. 1970-an*. PSDR.LIPI.  
Diakses dari: <http://psdr.lipi.go.id/>
- Chapman, D. (2011). Geographies of Self and Other: Mapping Japan through the Koseki. *The Asia-Pacific Journal / Japan Focus*, 9, No. 2(29), 1–20.
- Dewi, A. (Ed. . (2021, August 14). Pernyataannya Terkait Kaum Tunawisma Menuai Kritik, Mentalis Jepang Akhirnya Minta Maaf. *Tribunnews*.  
Diakses dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/08/14/pernyataannya-terkait-kaum-tunawisma-menuai-kritikan-mentalis-jepang-akhirnya-minta-maaf>
- Elvrum, P., & Wong, W. Y. (2012). *A Study of the Disadvantages of the Homeless in Tokyo in Disaster Situations*. Norwegian University of Life Sciences.
- Japan, M. (2021). “There is no discrimination in Japan”: survey results show statement is far from true. *Mainichi.Jpn*.  
Diakses dari: <https://mainichi.jp/english/articles/20210220/p2a/00m/0na/015000c>

- Kambayashi, T. (2004). *Japan's homeless face ageism*. Csmonitor.Com.  
Diakses dari: <https://www.csmonitor.com/2004/1018/p07s01-woap.html>
- Kimura, M. (2010). On The Poor And Homeless In Tokyo. *The 11th Meeting of German-Japanese Society for Social Sciences 8 October 2010, Hosei University, Tokyo, JAPAN, October*, 1–17.
- Lubis, Y. A. (2004). Memahami Cultural Studies dan Multikulturalisme dari Perspektif Pasca Modern. *Wacana*, 6(2), 103–131.
- Miura, J. (2019). Not Even Human : The Birth of the Outcaste in Tokugawa Japan. *Hohonu*, 17, 28–31.
- Roth, J. H. (2007). Political and Cultural Perspectives on “Insider” Minorities. *A Companion to the Anthropology of Japan*, 3(4), 73–88.  
Diakses dari: <https://doi.org/10.1002/9780470996966.ch6>
- Sicca, S. P. (Ed. . (2021). *Olimpiade Tokyo 2020: Para Tunawisma Disembunyikan demi Citra Kota Bersih Jepang*. Kompas.Com.  
Diakses dari: <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/06/050716970/olimpiade-tokyo-2020-para-tunawisma-disembunyikan-demi-citra-kota-bersih?page=all>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci [The Anatomy of Antonio Gramsci's Theory of Hegemony]. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Visočnik, N. (2014). Living on the edge: Buraku in Kyōto, Japan. *Anthropological Notebooks*, 20(2), 127–143.
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.
- Watch, H. R. (2020). *Japan Events of 2019*. Hrw.Org.  
Diakses dari: <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/japan>
- Yamamoto, H. (2001). *Homunculus (Vol.1)*. Shogakukan Seinen.